

**MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
MELALUI BAITUL MAAL WATTAMWIL DI YOGYAKARTA**
(Studi Kasus BMT Bina Ummah, BMT Bina Ihsanul Fikri, dan BMT Artha Amanah)
**THE MODEL OF COMMUNITY ECONOMY EMPOWERMENT
THROUGH BAITUL MAAL WATTAMWIL IN YOGYAKARTA**
(Study Cases at BMT Bina Ummah, BMT Bina Ihsanul Fikri, and BMT Artha Amanah)

Chairina Fadila dan Andri Martiana

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Lingkar Selatan (Brawijaya)

Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

Email: chairinafadila@gmail.com ; andri.martiana@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pemberdayaan ekonomi melalui Baitul Maal Wattamwil (BMT) di Yogyakarta. Pengambilan data dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sampel penelitian adalah tiga BMT, yaitu BMT Bina Ummah, BMT Bina Ihsanul Fikri, dan BMT Artha Amanah yang menjalankan program pemberdayaan ekonomi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang datanya diambil melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapat adalah model pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh BMT adalah model pemberdayaan versi Schumacher. Ketiga BMT mengalami beberapa kendala selama menjalankan pemberdayaan. Dengan meningkatkan penggunaan sosial media, fokus pemberdayaan beberapa daerah, menambah kerjasama, dan memberikan motivation training kepada kaum duafa dapat mengatasi beberapa kendala.

Kata Kunci: *Pemberdayaan ekonomi, BMT, Kemiskinan*

Abstract

This study aimed at determining the model of economic empowerment through Baitul Maal Wattamwil (BMT) in Yogyakarta. The data collecting was conducted in Yogyakarta Special Territory with three BMT samples namely BMT Bina Ummah, BMT Bina Ihsanul Fikri, and BMT Artha Amanah which run economic empowerment program. The type of research is qualitative with a case study approach in which the data were collected through interviews, observations, and documentation. The results obtained are the economic empowerment model run by BMT is the Schumacher version of empowerment model. The three BMTs experienced several obstacles during the process of empowerment. By increasing the use of social media, focusing the empowerment in several regions, increasing cooperation, and providing motivation training to the poor, several obstacles are overcome.

Keywords: *Economic empowerment, BMT, Poverty*

PENDAHULUAN

Adanya kesenjangan antara masyarakat ekonomi kelas menengah ke atas dengan masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah yang belum bisa diminimalisasi menunjukkan keadilan yang belum merata. Salah satu cara untuk menghitung kesenjangan ekonomi adalah dengan cara perhitungan rasio gini.



Sumber : BPS. Dipublikasi Januari 2020 (diolah)

Gambar 1.
Daftar 10 provinsi dengan gini rasio tertinggi

Rasio gini adalah suatu ukuran pemerataan dengan membandingkan jumlah rumah tangga dengan rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah tangga. Ketika nilai koefisien gini mendekati nilai nol, maka hal ini menunjukkan meratanya pendapatan yang didapatkan oleh rumah tangga.¹ Dari data rasio gini yang dikeluarkan dari BPS (Badan Pusat Statistik) hingga bulan September 2019 menunjukan Daerah Istimewa Yogyakarta menempati urutan pertama dengan rasio gini tertinggi se-Indonesia, yaitu sebesar 0.428 (Gambar 1.).²

¹ Windhu Putra, *Perekonomian Indonesia : Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pres, 2018), Hlm. 246

² Badan Pusat Statistik, Gini Ratio September 2019 tercatat sebesar 0,380. Diakses pada 21 Februari 2020. <https://bps.go.id>.

Untuk mengatasi masalah kesenjangan yang terjadi di Indonesia, ekonomi kapitalis tidak bisa menjadi solusi. Karena ekonomi kapitalis hanya akan menciptakan kesenjangan yang kian tinggi seraya masyarakat miskin makin tertindas dengan adanya bunga.³ Maka untuk menjawab tantangan tersebut, ekonomi syariah hadir dengan sistem keuangan yang selaras dengan ajaran agama Islam serta dapat membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Ekonomi syariah dikatakan selaras dengan ajaran agama Islam karena di dalam sistem ekonomi syariah terdapat dua bagian syariat agama, yaitu ibadah dan *muamalah*. Ibadah merupakan bagian yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. *Muamalah* merupakan bagian yang mengatur hubungan antara sesama manusia mulai dari sosial, ekonomi, sampai politik.⁴ Ibadah dan *muamalah* berkaitan satu sama lain. Contohnya zakat. Zakat merupakan ibadah yang wajib muslim tunaikan. Dengan menunaikan zakat, dapat membantu masyarakat miskin atau duafa yang membutuhkan. Karena zakat merupakan bagian harta untuk orang miskin atau duafa.

Ekonomi syariah di Indonesia makin berkembang. Hal ini terlihat dari banyaknya lembaga keuangan syariah seperti bank kian tumbuh sejak bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat resmi beroperasi pada tahun 1992.

Selain lembaga keuangan syariah, terdapat juga lembaga yang memberikan pelayanan simpan pinjam serta menghimpun dan menyalurkan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf), yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* atau bisa disebut dengan BMT. Pada tahun 2015, BMT melakukan peningkatan dalam pendayagunaan ekonomi pedesaan dengan memberikan pelayanan tabungan dan finansial kepada masyarakat. Sejak itu, jumlah BMT terus berkembang dan membawa peran penting dalam membangun keuangan syariah di Indonesia di kalangan masyarakat bawah dan menjadi tolak ukur untuk perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Islam di seluruh dunia.⁵

Buku “Dua Dekade Ekonomi Syariah Menuju Kiblat Ekonomi Islam” menuliskan peran BMT dalam membasmi kemiskinan sangat strategis. Selain berbisnis (*at-tamwil*) BMT juga melakukan kegiatan sosial (*Baitul Mal*) dengan menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf dengan dengan akad *qardhul hasan* (pinjaman kebaikan).

³ Anif Punto Utomo, dkk, *Dua Dekade Ekonomi Syariah Menuju Kiblat Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gres, 2014), hlm. 25

⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), hlm. 9

⁵ Bappenas. *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*. 2016. hlm.6

Sehingga, selain *profit oriented* BMT juga bersifat *social oriented* yang keduanya sama-sama mampu mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi.⁶

Sifat *social oriented* pada BMT ditemukan dalam kegiatan bidang *maal*. Salah satu kegiatan bidang *maal* yang bersifat *social oriented* adalah dalam penyaluran dana ZIS. Dana ZIS disalurkan dalam bentuk seperti: beasiswa, biaya pengobatan gratis, bantuan sosial lainnya seperti sedekah air bersih, dan pembiayaan *qardhul hasan* bagi usaha mikro yang kesulitan permodalan usahanya.⁷ Pembiayaan dengan *qardhul hasan* pada BMT ini ditawarkan kepada masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan modal untuk menjalankan usaha. Hal ini merupakan cara BMT dalam memberdayakan masyarakat menengah ke bawah di bidang ekonomi.

Dengan keistimewaan BMT yang bersifat *profit-social oriented* tersebut, peneliti bertujuan untuk meneliti model pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh beberapa BMT di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi BMT yang sudah maupun belum memiliki program pemberdayaan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian terdahulu sangat diperlukan guna membantu peneliti untuk memberi gambaran terhadap masalah yang akan dibahas. Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini :

Pertama, Penelitian Azis Muslim yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Yayasan Perjuangan Wahidiyah”. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Wahidiyah dilaksanakan melalui koperasi yang selain menjadi tempat peminjaman modal juga menjadi wadah pembangun solidaritas antar anggota. Perbedaannya dengan penelitian peneliti adalah teori pemberdayaan ekonomi yang digunakan adalah teori Wrihatnolo. Teori ini menjelaskan pemberdayaan dimulai dari penyadaran (membangun mental spiritual), *capacity building* (pemberian pelatihan), dan pemberian daya (bantuan modal dan pemasaran).⁸

Kedua, Penelitian Asep Suryanto dan Asep Saepulloh yang berjudul “Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid : Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis

⁶ Anif Punto Utomo, dkk, op.cit. hlm. 166-167

⁷ Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), hlm. 27

⁸ Azis Muslim, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Yayasan Perjuangan Wahidiyah*. *INFERENSI*, Vol. 10, No. 2, 2016, hlm. 335-358.

Masjid di Kota Tasikmalaya”. Hasil penelitian ini adalah model pemberdayaan ekonomi yang masjid lakukan adalah model terintegrasi antara lembaga ZIS, keuangan mikro Islam dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah metode penelitian yang dipakai adalah *grounded research* karena tujuan penelitian adalah merumuskan model pemberdayaan ekonomi masjid di Kota Tasikmalaya.⁹

Ketiga, Penelitian Yasushi Suzuki, Sigit Pramono, dan Rufidah yang berjudul “*Islamic Microfinance and Poverty Alleviation Program: Preliminary Research Finding From Indonesia*”. Hasil penelitian ini adalah cara untuk mengurangi kemiskinan melalui pendekatan yang diusulkan oleh Bigg dan Satterthwaite (2005), yaitu dengan cara penguatan organisasi lokal dan pengembang masyarakat seperti keuangan mikro syariah harus terlibat dalam kemitraan strategis dengan masjid-masjid dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah Penelitian menggunakan teori pendekatan yang diusulkan oleh Bigg dan Satterthwaite tahun 2005.¹⁰

Keempat, Penelitian Umiyati yang berjudul “*Local Economics Empowerment and Sharia Microfinance in Rural Community Perception*”. Hasil penelitian ini menunjukkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat pedesaan terhadap produk dan layanan lembaga keuangan mikro syariah mempengaruhi persepsi masyarakat pedesaan terhadap lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah data dikumpulkan melalui survei dan kuesioner yang kemudian dianalisis dengan regresi linier berganda.¹¹

Kelima, Penelitian Abul Hassan, Shamim Saleem, *An Islamic microfinance business model in Bangladesh: its role in alleviation of poverty and socio-economic well-being of women*. Hasil penelitian ini adalah peningkatan pendapatan dan sumber daya memiliki peran penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan dan rasa percaya diri. Penting untuk keuangan mikro Islam untuk terlibat dalam kegiatan membangun yang akan mendorong kesejahteraan penerima dalam jangka

⁹ Asep Suryanto dan Asep Saepulloh, Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid : Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya. *Iqtishoduna*, Vol. 8, No. 2, 2016, hlm. 1-27

¹⁰ Yasushi Suzuki, Sigit Pramono, dan Rufidah, Islamic Microfinance and Poverty Alleviation Program: Preliminary Research Finding From Indonesia. *SHARE*, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm. 63-82.

¹¹ Umiyati, Local Economics Empowerment and Sharia Microfinance in Rural Community Perception. *Shirkah*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 41

panjang. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi dan melakukan korelasi dengan *cross sectional data*.¹²

Pemahaman mengenai pemberdayaan masyarakat itu sendiri, menurut Karl Marx adalah proses perjuangan kaum *powerless* untuk memperoleh *surplus values* sebagai hak normatifnya. Untuk mendapatkan *surplus values* harus melalui penguasaan faktor-faktor produksi. Karena faktor-faktor produksi yang tidak dapat dikuasai oleh masyarakat lemah membuat mereka mengalami ketidakberdayaan sehingga perlunya pemberdayaan untuk memberikan ruang kepada mereka dalam berbagi kuasa dengan masyarakat yang kuat.

Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk memberantas kemiskinan. Paradigma pemberdayaan adalah untuk mengubah keadaan dengan memberi kesempatan kepada masyarakat miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang juga mereka pilih sendiri. Masyarakat juga dapat mengelola dana baik dari pemerintah atau pihak lain. Terdapat dua model pemberdayaan, yaitu:

Pertama, Model pemberdayaan versi Paul Freire. Model ini juga bisa disebut sebagai metodologi *conscientization*, yaitu proses belajar dengan melihat konflik sosial, ekonomi, dan politik pada suatu masyarakat yang kemudian disusun cara untuk menghilangkan kondisi yang menindas masyarakat.

Kedua, Model pemberdayaan versi Schumacher. Schumacher berpendapat bahwa manusia dapat membangun dirinya sendiri tanpa harus terlebih dahulu menghilangkan masalah struktural yang ada pada masyarakat. Menurut Schumacher strategi yang paling tepat untuk menolong rakyat miskin adalah dengan memberikan mereka kail bukan ikan agar mereka dapat mandiri.

Untuk pemberdayaan versi Paulo Freire, akan sulit diaplikasikan apabila pemberdayaan tersebut dihadapkan pada kepentingan-kepentingan yang dominan dalam suatu masyarakat. Para kaum elite pasti akan menolak pemberdayaan versi ini karena keradikalannya. Sedangkan versi Schumacher, tidak akan banyak membawa perubahan tanpa ada dukungan politik.

¹² Abul Hassan dan Shamim Saleem, An Islamic Microfinance Business Model in Bangladesh: Its Role in Alleviation of Poverty and Socio-Economic Well-Being of Women. *Humanomics*, Vol. 33, No. 1, 2017, hlm. 15-37.

Pemberdayaan tidak akan berhasil jika kelompok masyarakat tidak diizinkan untuk mendirikan organisasi yang dibentuk oleh mereka dan untuk mereka. Hal yang sangat penting dalam memberdayakan masyarakat adalah dengan mengetahui kesulitan-kesulitan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi model pemberdayaan harus sadar bahwa model ini memfokuskan pada transformasi hubungan antara kekuatan sosial, politik, dan ekonomi dalam suatu negara. Model ini juga tidak akan berjalan jika tidak didukung oleh suatu sistem peradilan yang mandiri.¹³

Secara umum, kegiatan pemberdayaan ekonomi berdasarkan kepada yang dibahas oleh M. Guntur Effendi memiliki dimensi pendekatan, seperti berikut:

Pertama, Bantuan modal. Bantuan modal menjadi faktor yang penting untuk masyarakat tuna daya. Lambatnya akumulasi modal pada pengusaha mikro, kecil, dan menengah, menjadi salah satu penyebab lesunya laju perkembangan usaha. Pemberian bantuan modal langsung dengan cara hibah, kurang mampu mendidik masyarakat untuk bertanggung jawab dengan dirinya sendiri.

Kedua, Bantuan pembangunan prasarana. Aspek penting dalam usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah dengan pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Pembangunan prasarana produksi akan menjadi kurang efektif untuk mendorong tumbuh dan produktivitasnya usaha tanpa disertai dengan adanya pemasaran. Karena pemasaran membantu dalam peningkatan pendapatan para pengusaha

Ketiga, Penguatan kelembagaan. Pada awalnya pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan pendekatan individual. Karena hasil pendekatan individual kurang memuaskan, maka dilakukan pendekatan kelompok. Kemudian dalam pengelompokkannya diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal ke lembaga keuangan yang ada, membangun skala usaha yang ekonomis, dan membangun kemitraan antar skala usaha dan jenis usaha.

Keempat, Penguatan kemitraan usaha. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, antara yang besar hanya akan berkembang dengan adanya yang kecil dan menengah, ataupun sebaliknya. Karena pemberdayaan itu sendiri berarti *give power to everybody*. Daya saing yang tinggi akan ada ketika antara

¹³ Anggito Abimanyu, dkk. *Pemberdayaan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat*. (Yogyakarta: PAU-SE UGM bersama BPFE-Yogyakarta, 1997), hlm.139-143

kelompok yang besar dengan yang menengah atau kecil terjadi keterkaitan. Keterkaitan ini bisa terjadi melalui kemitraan dalam proses produksi, permodalan, sampai dengan distribusi, hingga masing-masing kelompok dapat diperdayakan.¹⁴

Kelima, Bantuan pendampingan. Tugas utama pendamping adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan antara usaha mikro, usaha menengah maupun usaha besar. Untuk menjamin keberlanjutan dari hasil usaha pendampingan adalah dengan melibatkan pendamping dari internal bukan eksternal yang bersifat sementara.¹⁵

Baitul maal wattamwil merupakan lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada kegiatan ekonomi berskala mikro. Menurut Soemitra, terdapat dua istilah yang merupakan fungsi dari *Baitul Maal Wattamwil* (BMT), yaitu:

Pertama, *Baitul maal* atau rumah harta, yaitu menerima dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah secara amanah. Kedua, *Baitul tanwil* atau rumah pengembangan harta, yaitu melakukan investasi dan pengembangan usaha produktif dalam meningkatkan ekonomi pengusaha mikro atau mikro. Dari dua istilah di atas dapat disimpulkan BMT merupakan lembaga penyalur pendayagunaan dana ibadah (zakat, infak, sedekah dan wakaf) yang juga dapat bergerak dalam kegiatan investasi produktif. Secara umum fungsi BMT adalah mengidentifikasi, mengorganisir dan mengembangkan potensi SDM serta kemampuan ekonomi.¹⁶ Menurut Sudarsono, BMT memiliki peran untuk: mencegah praktek ekonomi *non* syariah dari masyarakat, melepaskan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir, memberikan pendanaan dan pembinaan usaha kecil, serta melindungi keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.¹⁷

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun *non* makanan yang diukur dari pengeluaran.¹⁸ Di Islam, orang yang terkategori miskin berhak mendapatkan manfaat dari zakat. Zakat merupakan Rukun Islam yang wajib dilaksanakan sebagai seorang muslim yang memiliki harta lebih, yang manfaat dari zakat itu tidak hanya bernilai ibadah namun juga dapat meningkatkan

¹⁴ Effendi M. Guntur, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. (Jakarta: Sagung Seto, 2009), hlm. 10-13

¹⁵ *Ibid.* hlm. 12

¹⁶ Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 451-452

¹⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), hlm.108-109

¹⁸ Badan Pusat Statistik, *Kemiskinan dan Ketimpangan*, 2016.

kesejahteraan bagi delapan golongan yang berhak menerimanya atau biasa disebut dengan delapan asnaf.

Berdasarkan surat At-Taubah, delapan golongan orang dalam Islam yang berhak menerima zakat di antaranya adalah: fakir, miskin, mualaf, hamba sahaya atau *riqab*, *gharim*, *fii sabilillah*, *ibnu sabil*, dan amil zakat.¹⁹ (Baznas, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan pendekatan studi kasus. Dengan keterbatasan penelitian, peneliti menggunakan *purposive sampling* dan mengambil tiga BMT sebagai sampel penelitian dengan kriteria: Memiliki program pemberdayaan ekonomi, merupakan rujukan dari Pusat Koperasi Syariah (PUSKOPSYAH), dan sudah beroperasi selama lebih dari 20 tahun di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel yang menjadi lokasi penelitian adalah: BMT Bina Ummah, BMT Ihsanul Fikri (BIF), dan BMT Artha Amanah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan kepada pengurus BMT yang terlibat langsung dalam program pemberdayaan ekonomi yang diadakan BMT untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan ekonomi dilaksanakan dan dampaknya bagi masyarakat. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada penerima manfaat pemberdayaan ekonomi BMT. Wawancara bersifat semi terstruktur. Berikut tabel kode responden wawancara yang dilakukan.

Tabel 1.
Kode Nama Respoden

| Keterangan | Kode Lembaga | | |
|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| Lembaga | BMT Bina Ummah (RA) | BMT BIF (RB) | BMT Artha Amanah (RC) |
| Pengurus | RA1 | RB1 | RC1 |

¹⁹ Badan Amil Zakat Nasional, Ini 8 Golongan yang Berhak Terima Zakat, 2019

| Penerima manfaat | RA2 | RB2 | RC2 |
|---------------------|-----|-----|-----|
|---------------------|-----|-----|-----|

Teknik Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data yang digunakan pada penelitian adalah meningkatkan ketekunan dan triangulasi. Triangulasi yang dilakukan adalah dengan triangulasi sumber, yaitu dengan mendiskusikan dengan beberapa sumber terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis model Miles dan Huberman yang menganalisis data kualitatif hingga data yang diperoleh jenuh.²⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh ketiga BMT adalah model pemberdayaan versi Schumacher. Secara umum, model kegiatan pemberdayaan yang dijalankan oleh masing-masing BMT hampir sama karena ketiga BMT tergabung dalam PBMT *maal* DIY. Terdapat sedikit perbedaan terkait pihak yang diajak berkerjasama serta beberapa teknis pada masing-masing BMT. Lima model kegiatan pemberdayaan ekonomi BMT dari tiga BMT disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2.
Model Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi BMT

| Kegiatan | Lembaga | | |
|-----------------------|---------|----|----|
| | RA | RB | RC |
| Bantuan Modal | √ | √ | √ |
| Prasarana | √ | — | √ |
| Penguatan Kelembagaan | √ | √ | √ |
| Penguatan Kemitraan | √ | √ | √ |
| Bantuan Pendampingan | √ | √ | √ |

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.224-246

Dari Tabel 2. terdapat persamaan dan perbedaan dalam penerapan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh ketiga BMT. Penerapan kegiatan pemberdayaan masing-masing hampir sama, yaitu pada pemberian bantuan dalam bentuk dana, penguatan kelembagaan, dan bantuan pendampingan.

Pertama, bantuan dana. Masyarakat yang mendapat bantuan dana dari masing-masing BMT merupakan masyarakat yang termasuk ke dalam delapan golongan asnaf sebagai penerima manfaatnya. Kemudian persamaan selanjutnya adalah pada penguatan kelembagaan. Ketiga, BMT melakukan penguatan kelembagaan dengan menggunakan pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok dilakukan pada saat tiap masing-masing BMT melakukan pendampingan kepada anggota atau mitra BMT. Persamaan selanjutnya adalah pada bantuan pendampingan yang dilakukan oleh masing-masing BMT. Masing-masing BMT melakukan pendampingan dengan cara mengumpulkan para mitra atau penerima manfaat di masjid kemudian diisi dengan pemberian materi seputar Islam dan ekonomi.

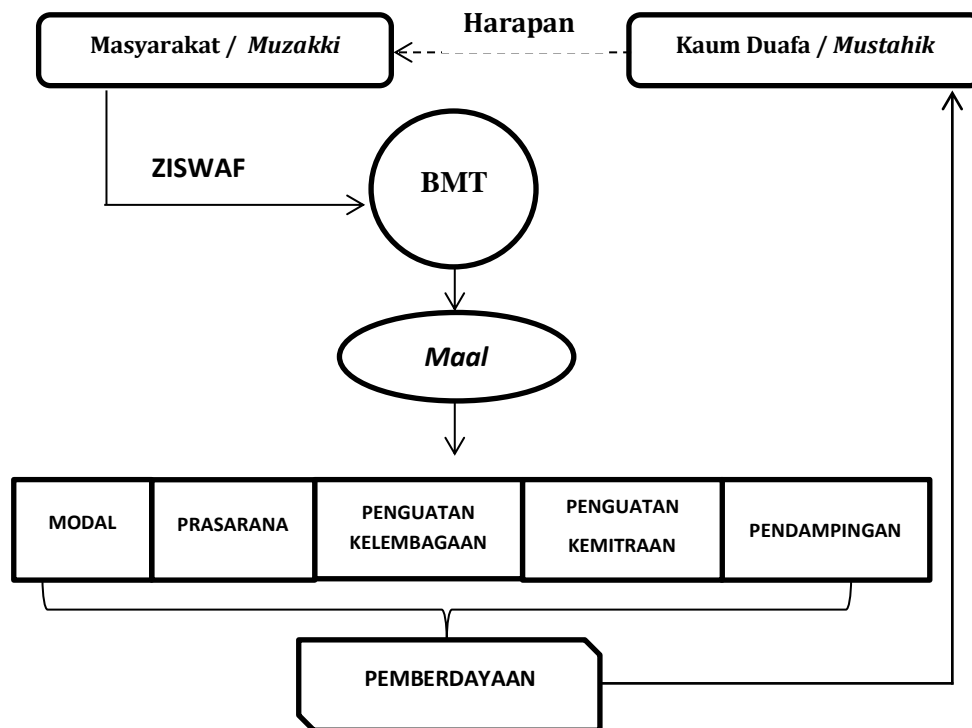
Terdapat sedikit perbedaan pada sasaran bantuan modal yang diberikan oleh salah satu BMT. Salah satu BMT ini, BMT RB dulu memberikan bantuan modal kepada para kaum duafa sama seperti kedua BMT lainnya. Tetapi banyaknya kaum duafa yang tidak bertanggung jawab dengan bantuan modal yang diberikan, sehingga BMT ini memilih untuk melanjutkan bantuan modal ke panti asuhan dan pondok pesantren.

Perbedaan selanjutnya adalah pada bantuan prasarana yang ditawarkan oleh ketiga BMT. BMT RA dan BMT RC memberikan bantuan prasarana berupa paket usaha. Paket usaha sama-sama dimiliki oleh BMT RA dan RC adalah paket usaha angkringan. Di BMT RB, bantuan prasarana tidak diberikan. Sehingga program seperti paket usaha angkringan tidak ada di BMT RB. Ketika mitra atau anggota dari BMT RB membutuhkan prasarana, harus melalui proses pengajuan dengan akad *murabahah*.

Ketiga BMT juga melakukan penguatan dalam kemitraan usaha. Yang menjadi berbeda adalah masing-masing BMT melakukan kerjasama dengan beberapa instansi yang berbeda satu sama lain. Seperti BMT RA melakukan kerjasama dengan LPK dalam pemberian pelatihan, BMT RB melakukan kerjasama dengan lembaga keagamaan seperti PRM Muhammadiyah dalam pengelolaan panti, dan BMT RC yang

berkerjasama dengan beberapa swalayan untuk membantu memasarkan produk dari program mereka.

Berikut merupakan alur model pemberdayaan ekonomi melalui ketiga BMT disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2.

Alur Model Pemberdayaan Ekonomi Melalui BMT

Pada Gambar 2. menunjukkan kegiatan pemberdayaan melalui BMT berawal dari masyarakat yang memberikan dananya dalam bentuk zakat, infaq, sedekah, dan wakaf kepada BMT dan mempercayakan penyalurannya. Dana ZISWAF itu disalurkan oleh bagian *maal* ke beberapa program pemberdayaan yang disediakan BMT. Program pemberdayaan yang disediakan BMT menyesuaikan dengan karakter orang Yogyakarta. Untuk pemberdayaan ekonomi, BMT menyalurkannya dalam bentuk bantuan modal atau prasarana berupa paket usaha. Sebelum memberikan bantuan modal atau prasarana, BMT melakukan survei terkait karakter dan potensi kaum duafa untuk menentukan calon penerima manfaat dana ZISWAF yang sudah diterima BMT. Dalam hal ini BMT bersifat menawarkan bantuan kepada kaum duafa, tidak memaksa. Jika mereka tidak mau, BMT mencari calon penerima manfaat lainnya.

Ketika seorang duafa yang ditawarkan mau menerima bantuan dari BMT, beliau juga harus dengan menyelesaikan syarat-syarat administratif salah satunya fotokopi KTP. Setelah menyelesaikan syarat-syarat administratif, penerima manfaat tersebut dapat menerima bantuan dana atau paket usaha yang diberikan oleh BMT. Ketika penerima manfaat sudah mulai menjalankan usahanya, BMT bertugas untuk melakukan monitoring melalui pendampingan setiap beberapa minggu atau bulan. Pendampingan biasa dilakukan di masjid dengan penerima manfaat lainnya. Disana, penerima manfaat ikut mengaji, mendapat kajian, dan dapat berbagi keluh kisah dengan penerima manfaat lainnya. Ini salah satu strategi BMT untuk menguatkan tali ikatan dengan para penerima manfaatnya.

Hal yang menjadi indikator keberhasilan dalam model pemberdayaan menurut PBMT *maal* DIY adalah dari bantuan modal atau paket usaha yang diberikan, ke depannya penerima manfaat dapat menjalani usaha secara mandiri dan kelak menjadi seorang *muzakki*. Berusaha sesuai arahan dari PBMT *maal* pun sudah merupakan ekspektasi PBMT *maal* DIY. Menurut BMT RA dan RC, indikator program pemberdayaan itu berhasil adalah ketika penerima manfaaat sudah mengalami peningkatan pendapatan atau bisa mencapai UMR. Hal tersebut merupakan indikator keberhasilan secara kasar mata.

Selama melangsungkan pemberdayaan ekonomi, dari masyarakat, pihak BMT dan penerima manfaat menemukan beberapa kesulitan. Menurut Ketua Badan Amil Zakat (BAZNAS) DIY, kesulitan yang ditemukan dari masyarakat adalah kurang maksimalnya pengumpulan dana ZIS oleh BMT. DIY memiliki potensi ZIS sebesar Rp 150 miliar per tahunnya, tetapi data di lapangan rata-rata dana ZIS yang didapatkan oleh BMT itu sebesar Rp 30 juta per bulannya. Hanya sekitar 0,24% yang dapat dikumpulkan oleh BMT. Karena dari masyarakat itu sendiri belum banyak yang membayarkan zakatnya kepada lembaga berwenang (Murdaningsih, 2019). Dari pihak BMT, salah satunya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa ada penerima manfaat yang menggampangkan dana zakat. Ketika menggampangkan dana zakat yang diberikan, mereka cenderung enggan untuk mencoba mengembalikan dana yang sudah diberikan, walau memang itu hak mereka.

Kesulitan seperti masih terbatasnya pegawai khusus *maal* membuat pegawai khusus *maal* yang ada kesulitan dalam memberikan pendampingan yang sama dengan

jumlah pendampingan yang diberikan kepada penerima manfaat lainnya. Hal ini juga dinyatakan pihak PBMT maal bahwa terdapat kesulitan dari sisi SDM, karena SDM yang dapat mengampu terkait maal belum banyak di BMT se-DIY.

Di lapangan juga didapati bahwa tidak semua duafa memiliki keinginan besar untuk sejahtera atau bisa dibilang tidak semangat untuk mengubah keadaannya. Karena masyarakat miskin sering merasa tidak percaya diri dengan dirinya dapat mempunyai kehidupan yang lebih baik. Ada juga penerima manfaat yang tidak mau mengubah profesinya atau usahanya. Mereka cenderung tidak berani untuk pindah profesi atau jenis usaha karena sudah merasa nyaman dengan keadaannya sekarang.

Terkait pendanaan, BMT tidak mendapat dukungan dana untuk menjalani program pemberdayaan. Membuat surat proposal, brosur hingga memberikan presentasi ke beberapa instansi dilakukan untuk mendapatkan dana. Hanya salah satu dari tiga BMT yang mendapat dukungan dari pemerintah atau perangkat desa. Bantuan ini bukan dalam bentuk pendanaan, melainkan dengan pemberian pelatihan dan membantu dalam memasarkan produk hasil dari usaha penerima manfaat yang mengikuti program pemberdayaan yang diberikan oleh BMT. Pemasaran hasil program pemberdayaan juga merupakan kesulitan yang sering dihadapi BMT-BMT di DIY.

Dari pihak penerima manfaat, terdapat kesulitan dalam pemasaran produk yang mereka buat, baik itu karena kalah bersaing dengan toko atau dengan usaha yang sudah lebih dulu. Saat peneliti berada di salah satu lokasi rumah penerima manfaat, peneliti juga menemukan bahwa warga daerah tersebut banyak yang melakukan pinjaman uang ke bank pelecit. Hal dikarenakan mudahnya syarat peminjaman uang. Hanya dengan KTP, orang-orang sudah bisa meminjam uang ke bank pelecit. Namun saat pengembalian adalah hal yang paling sulit untuk semua orang yang melakukan pinjaman. Mereka didatangi hampir setiap hari oleh bank pelecit karena sistem pengembalian dari pinjaman mereka adalah perhari. Penarikan itu mulai berlaku sehari setelah mereka melakukan pinjaman. Misalnya, ketika seseorang melakukan pinjaman pada hari Senin. Maka pada hari Selasa setelah dia meminjam, rentenir dari bank pelecit sudah melakukan penarikan untuk menarik pinjaman yang dipinjam.

Dari beberapa kesulitan yang dihadapi BMT dapat diklasifikasikan menjadi empat bagian, yaitu: dana, SDM, pemasaran, dan penerima manfaat. Untuk solusinya, dapat dilakukan hal sebagai berikut :

Pertama, meningkatkan penggunaan sosial media. Menurut laporan *we are social* berkerjasama dengan *Hootsuite*, menyatakan bahwa pengguna internet dan sosial media di dunia meningkat lebih dari 300 juta pada satu tahun terakhir ini. Mengutip dari *DataReportal*, pengguna sosial media mengalami peningkatan sekitar 8 persen sejak bulan April 2019.²¹

Di Indonesia, pengguna media sosial aktif sendiri sudah mencapai 150 juta pengguna pada bulan Januari tahun 2019.²² Berdasarkan berita Liputan6, Indonesia menempati posisi puncak *Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index 2018* dengan skor 59 persen. Untuk skor berdonasi materi sebesar 78 persen, membantu orang lain sebesar 46 persen, dan melakukan kegiatan sukarelawan sebesar 53 persen.²³ Hal ini menjadi peluang yang sangat besar bagi BMT untuk melakukan *fund raising* maupun dalam memasarkan program atau produk hasil usaha penerima manfaat yang dibina.

Dengan pemberian informasi secara transparan dan menarik ke berbagai media sosial dapat menambah peningkatan dana ZISWAF dan sarana pemasaran bagi para penerima manfaatnya. Mempelajari kebiasaan masyarakat di media sosial juga diperlukan untuk menentukan segmentasi pasar. Selain itu juga BMT dapat mengatasi kendala kurangnya SDM dengan menginformasikan peluang kerja ke sosial media yang ada.

Kedua, fokus pemberdayaan beberapa daerah terlebih dahulu. Dengan fokus kepada beberapa daerah terlebih dahulu dapat membantu BMT untuk bekerja lebih maksimal dalam menjalankan pemberdayaan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan pertama kali kepada daerah yang berada disekitar kantor BMT.

Bisa dimulai dengan berdiskusi dengan tokoh masyarakat disana seperti ulama atau kepala desa. BMT perlu mengetahui serta melibatkan diri ke beberapa kegiatan masyarakat sekitar salah satunya seperti kegiatan Idul Adha misalnya. BMT bisa mengarahkan masyarakat untuk mendaftarkan kurban serta membantu

²¹ Simon Kemp, Digital Around The World in April 2020, *We are social*. Diakses pada 13 Juli 2020. <https://wearesocial.com/>

²² Simon Kemp, Digital 2019: Indonesia, *Datareportal*. Diakses pada 13 Juli 2020. <https://datareportal.com/>

²³ Fitri Haryanti Harsono, Indonesia Melesat Jadi Negara Paling Dermawan di Dunia, *Liputan6*. Diakses pada 13 Juli 2020. <https://www.liputan6.com>.

pendistribusiannya. Mengikuti atau menjalin kelompok masyarakat sekitar, membantu BMT dalam mempelajari karakter masyarakat sehingga dapat menentukan tindakan pemberdayaan ekonomi yang tepat. Selain itu hal ini dapat meningkatkan keakraban dan kepercayaan terhadap BMT sehingga dapat mengurangi masyarakat menggunakan jasa dari bank plecit.

Ketiga, menambah kerjasama dengan berbagai pihak. Banyak hal yang dapat teratasi dengan menambah kerjasama dengan berbagai pihak. Terkait dana ZISWAF misalnya. BMT bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan atau kantor sekitar yang tidak melayani pemotongan dana zakat secara langsung dari gaji atau ingin membayarkan zakatnya sendiri. Terkait pemasaran, kerjasama dengan toko swayalan, oleh-oleh atau tempat makan untuk memasarkan hasil produk usaha penerima manfaatnya. Komunitas masyarakat juga bisa menjadi target kerjasama BMT untuk melakukan *sharing* ilmu atau pelatihan sehingga dapat dicontoh oleh para penerima manfaat BMT.

Keempat, memberikan *motivation training* kepada kaum duafa. *Motivation training* sangat diperlukan untuk menumbuhkan semangat serta tujuan hidup kepada kaum duafa. Ketika kaum duafa membuat keputusan untuk hidup lebih baik, kaum duafa ini akan terdorong untuk memulai usahanya sendiri. Disini BMT dapat menentukan dan menyeleksi kaum duafa yang dapat menerima bantuan berdasarkan besarnya semangat dan keputusan mengubah hidup.

Pemberian motivasi dapat dilakukan beberapa kali untuk menjaga para penerima manfaatnya tetap fokus dan semangat untuk menjalankan tujuan usaha yang dilakukan. BMT dapat mengundang orang yang berhasil menjadi *muzakki* yang sebelumnya *mustahik*. Penerima manfaat RC2 misalnya. Dari pengalaman yang dibagikan, akan mendorong kaum duafa untuk memperbaiki hidup dan mengurangi rasa kebergantungan pada bantuan pemerintah. Perjanjian hitam diatas putih dengan BMT, juga dapat mengikat kaum duafa yang mendapat bantuan untuk berani melakukan komitmen dan bertanggung jawab dengan dilakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Model pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh ketiga BMT adalah model pemberdayaan versi Schumacher yang kemudian dijalankan dengan kegiatan

pemberdayaan yang menurut M. Guntur Effendi yang terdiri dari bantuan modal, pembangunan prasarana, penguatan kelembagaan, kemitraan usaha, serta pendampingan. Untuk menghadapi beberapa macam kesulitan yang dihadapi BMT dalam menjalankan pemberdayaan, solusi yang dapat dilakukan BMT adalah meningkatkan penggunaan sosial media., fokus pemberdayaan beberapa daerah terlebih dahulu, menambah kerjasama dengan berbagai pihak, dan memberikan *motivation training* kepada kaum duafa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, A., Harsono, Purnawan, M. E., Baswir, R., dan Handoko, T.H. (1997). *Pemberdayaan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat*. Yogyakarta: PAU-SE UGM bersama BPFE-Yogyakarta.
- Badan Amil Zakat Nasional. Ini 8 Golongan yang Berhak Terima Zakat. Diakses pada 3 Oktober 2019. <https://baznas.go.id>.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2016). Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia. Diakses pada 2 Oktober 2019. <https://www.bappenas.go.id>.
- Badan Pusat Statistik. (2016). Kemiskinan dan Ketimpangan. Diakses pada 1 Oktober 2019. <https://www.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik.(2020). Gini Ratio September 2019 tercatat sebesar 0,380. Diakses pada 21 Februari 2020. <https://bps.go.id>.
- Guntur, Effendi M. (2009). *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Sagung Seto.
- Harsono, Fitri Haryanti. (2019). Indonesia Melesat Jadi Negara Paling Dermawan di Dunia. *Liputan6*. Diakses pada 13 Juli 2020. <https://www.liputan6.com>.
- Hassan , A., & Saleem , S. (2017). An Islamic Microfinance Business Model in Bangladesh: Its Role in Alleviation of Poverty and Socio-Economic Well-Being of Women. *Humanomics*, Vol. 33, No. 1: 15-37.
- Karim, Adiwirman A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Kemp, Simon. (2019). Digital 2019: Indonesia. *Datareportal*. Diakses pada 13 Juli 2020. <https://datareportal.com/>
- Kemp, Simon. (2020). Digital Around The World in April 2020. *We are social*. Diakses pada 13 Juli 2020. <https://wearesocial.com/>

- Muslim, A. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Yayasan Perjuangan Wahidiyah. *INFERENSI*, Vol. 10, No. 2: 335-358.
- Putra, Windhu. (2018). *Perekonomian Indonesia : Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia*. Depok: Rajawali Pres.
- Soemitra. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, H. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supadie, D.A. (2013). *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Suryanto, A., & Saepulloh, A. (2016). Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid : Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya. *Iqtishoduna*, Vol. 8, No. 2: 1-27.
- Suzuki, Y., Pramono, S., & Rufidah. (2016). Islamic Microfinance and Poverty Alleviation Program: Preliminary Research Finding From Indonesia. *SHARE*, Vol. 5, No. 1: 63-82.
- Umiyati. (2017). Local Economics Empowerment and Sharia Microfinance in Rural Community Perception. *Shirkah*, Vol. 2, No. 1:, 41.
- Utomo, A. P., Subagja, G., Kushartanto, I., & Zulkarnain, A. I. (2014). *Dua Dekade Ekonomi Syariah Menuju Kiblat Ekonomi Islam*. Jakarta: Gres.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andri Martiana, Lc., M.A.
NIK : 19880328201504113045

adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Chairina Fadila
NPM : 20150730220
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Naskah Ringkas : Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
melalui Baitul Maal Wattamwil di Yogyakarta
(Studi Kasus BMT Bina Ummah, BMT Bina Ihsanul
Fikri, dan BMT Artha Amanah)

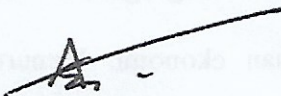
Hasil Tes Turnitin : 6%

Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

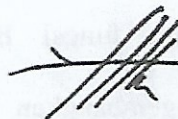
Yogyakarta, 14 Juli 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing Skripsi:



Dr. Maesyarah, M.A.



Andri Martiana, Lc., M.A.

**Wajib menyertakan hasil tes Turnitin atas naskah publikasi.*